



Kemana pohon-pohon itu?
-Kebijakan konservasi hutan baru SMG/APP dimulai setelah perusahaan tuntaskan penebangan terencananya di Riau



Laporan investigatif
Eyes on the Forest
Dipublikasikan April 2013

Eyes on the Forest (EoF) adalah sebuah koalisi LSM lingkungan hidup di Riau, Sumatra:
WALHI Riau, Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Alam Riau) dan WWF-Indonesia Program Riau.

EoF memantau status hutan alam yang tersisa di Provinsi Riau, Sumatra dan
menyebarkan informasi ke seluruh dunia.

Untuk mendapatkan berita lebih lanjut mengenai *Eyes on the Forest*, kunjungi: <http://www.eyesontheforest.or.id>

Untuk foto dan peta, kunjungi: <http://maps.eyesontheforest.or.id>

Email: [editor\(at\)eyesontheforest.or.id](mailto:editor(at)eyesontheforest.or.id)

Sampul depan

Foto: Hutan harimau Sumatra yang berada dalam area yang dideklarasikan sendiri oleh APP sebagai "Suaka Harimau Senepis" di konsesi PT. Suntara Gajapati, pemasok kayu SMG/APP di Provinsi Riau. Hutan yang telah ditebang tersebut berada pada lahan gambut sedalam lebih dari 4 meter yang dilindungi. Pohon-pohon Ramin (*Gonystylus sp.*) yang dilindungi CITES masih tetap berdiri. Foto diambil oleh Eyes on the Forest di 2°0'52.39"N, 101°8'16.15"E pada tanggal 11 Januari 2013.

Ringkasan

Pada Februari 2013, Asia Pulp & Paper (APP) dari Sinar Mas Group (SMG) menerbitkan "kebijakan konservasi hutan (FCP)" yang mengumumkan akhir dari penebangan hutan alam di seluruh rantai pasokan di Indonesia.

Sebagai responnya, Eyes on the Forest (EoF) menyigi manfaat konservasi dari kebijakan itu terhadap hutan, satwa liar dan lahan gambut di Riau. Sejak SMG/APP belum memberikan data rinci kepada kelompok masyarakat sipil, EoF menggabungkan data yang tersedia di publik dengan informasi yang dikumpulkan bertahun-tahun dari investigasi lapangan untuk analisisnya.

EoF mengidentifikasi 21 perusahaan pemasok tanaman industri untuk grup SMG/APP.

Konsesi-konsesi mereka mencakup 929.204 hektar dan memiliki 188.634 hektar hutan alam tersisa di tahun 2012. Sekitar 89% hutan alam tersisa seharusnya tidak dibabat karena dilindungi oleh peraturan serta tambahan 8% merupakan hutan yang dilindungi oleh komitmen-komitmen APP sebelumnya.

Kebijakan baru perusahaan pada puncaknya melindungi tambahan 5.171 hektar. Hutan-hutan ini terbilang kecil, tercerai-berai di beberapa konsesi, mungkin terlalu kecil untuk bisa membuat kontribusi berarti bagi konservasi ekosistem atau bahkan untuk bisa bertahan.

EoF juga menyigi legalitas, dampak hampir tiga dekade hutan alam yang dihancurkan oleh SMG/APP terhadap hutan sendiri, satwal liar dan lahan gambut di Riau. Konsesi-konsesi pemasok SMG/APP menghilangkan 683,281 hektar hutan alam antara 1985 dan 2012. Dari angka ini, 77% dihilangkan dengan cara dipertanyakan secara legalitas karena hutan-hutan itu sendiri dilindungi oleh rencana tata ruang TGHK, pembatasan lahan gambut dalam lebih dari 3 meter, dan/atau batas tutupan hutan 10% di tiap konsesi. Sementara 83% hutan hilang adalah habitat harimau dan gajah Sumatera, dimana 77% di antaranya berada di lahan gambut.

Perlu diperhatikan, kebijakan APP tidak mencakup restorasi dari hutan yang "dilindungi namun hilang", hutan di habitat satwal liar, tidak juga rehabilitasi lahan gambut, banyak gambut yang masih terus mengakibatkan emisi karbon karena digali secara konstan guna mempertahankan dan memanen perkebunan akasia. Pada waktu yang sama, SMG/APP menugaskan penilaian Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi yang banyak diiklankan di konsesi-konsesi setelah menuntaskan deforestasi terencana mereka dan hampir semua hutan tersisa siap dilindungi. Tanpa komitmen restorasi, nilai penyigian ini akan jadi nol.

Terlepas komitmen publik sebelumnya oleh APP untuk menjadikan bahan baku 100% kayu perkebunan –tahun 2004, 2007 dan 2009--, kecepatan rata-rata tahunan kehilangan hutan di konsesi pemasok tidaklah menurun secara signifikan antara 1995 dan 2011. Pengecualian terjadi ketika adanya penyidikan oleh kepolisian daerah Riau terhadap dugaan pembalakan liar oleh industri pulp dan kertas, termasuk oleh pemasok SMG/APP, yang mengakibatkan quasi-moratorium penebangan hutan antara 2007-2009. Kehilangan hutan secara drastis menurun dari 2011 yang mengindikasikan pemasok SMG/APP telah hampir habis pasokan hutan alamnya yang tersedia sebelum pengumuman kebijakan. Satu analisa terkini soal data pasokan kayu pemerintah hingga tahun ini oleh organisasi masyarakat sipil, Greenomics, menyimpulkan bahwa APP mengumumkan FCP setelah para pemasok mereka kehabisan hutan alam untuk dijadikan pulp di Riau dan dua provinsi lainnya di Sumatera.

Sebagai kesimpulan, FCP SMG/APP datang sangat terlambat bagi ekosistem tropis yang hancur di konsesi pemasok di Sumatera. Digabungkan dengan kurangnya komitmen

restorasi, manfaat konservasi dari kebijakan bagi wilayah operasional perusahaan di Sumatera cukup minim. Hal yang sama juga benar bagi kawasan yang dikendalikan pemasok SMG/APP di Kalimantan. Ini memerlukan evaluasi mendalam, bagaimanapun proses diperlambat oleh kurangnya data rinci oleh perusahaan.

Kebijakan juga kurang komitmen mendasar lainnya. FCP terus membiarkan kayu tropis campuran dikirim ke pabrik olah pulp SMG/APP tanpa batas, menciptakan celah lemah dimana para pemasok bisa menggunakan memasok kayu ke dalam pabrik dari penebangan baru yang melanggar kebijakan itu. Secara historis, pasokan kayu kepada SMG/APP datang dari penebangan hutan alam untuk pengembangan perkebunan sawit, infrastruktur atau kegiatan bukan kehutanan. Asal-muasal, legalitas dan dampak lingkungan pasokan ini jauh lebih sulit untuk diidentifikasi, dilacak dan dikendalikan terutamanya. Berita terkini bahwa dua pemasok di Kalimantan Barat melanggar moratorium yang diberlakukan APP juga menambah keprihatinan di kalangan LSM.

EoF mengimbau SMG/APP untuk memperbaiki lagi lahan gambut terpilih dan hutan yang hilang di kawasan Stok Karbon Tinggi dan Nilai Konservasi Tinggi yang dilindungi di semua konsesi pemasok; hentikan menerima semua kayu hutan alam di pabrik sampai tanggal 5 Mei 2013; mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh jalan dan kanal terhadap hutan alam sekitarnya, lahan gambut dan satwaliar; dan memberikan informasi rinci pada kawasan yang ada dan baru serta perencanaan ekspansi pabrik di Indonesia guna membiarkan pemantauan independen sejati dan evaluasi terhadap manfaat konservasi dari FCP.

EoF merekomendasikan para pembeli APP dan mitra bisnis lainnya untuk tidak membeli produk SMG/APP hingga pemantauan independen sejati telah mengonfirmasikan bahwa perusahaan telah memenuhi semua himbauan di atas dan melaksanakannya dengan sukses.

Pendahuluan

Sinar Mas Group Asia Pulp & Paper (SMG/APP) mempublikasikan “Kebijakan Konservasi Hutan” (*Forest Conservation Policy/FCP*)-nya pada tanggal 5 Februari 2013 dengan mengumumkan “penghentian penebangan hutan alam di seluruh rantai pasokannya di Indonesia, yang berlaku segera”¹.

Eyes on the Forest (EoF) pada dasarnya menyambut pengumuman tersebut.

Namun apakah sebenarnya arti hal tersebut?

Apabila dilaksanakan –seperti banyak pengumuman serupa di masa lalu yang belum dilaksanakan²- ekspansi SMG/APP seharusnya tidak lagi membahayakan hutan Indonesia, setidaknya tidak secara langsung. Tapi seberapa cepat dan dengan berapa banyak perusahaan akan memperluas kegiatan operasionalnya? SMG/APP tampaknya telah meraup lahan lebih cepat daripada yang lainnya dalam industri ini. Mungkin cukup lahan sehingga perusahaan mengumumkan memiliki perkebunan yang cukup untuk memasok pabrik super baru yang akan dibangun di Sumatera Selatan³. Apakah akan ada ekspansi yang lebih jauh? Atau apakah perusahaan mencapai kejenuhan dan telah memutuskan untuk mengkonsolidasikan asetnya dan bekerja dengan apa yang dimilikinya untuk memaksimalkan produktivitas perkebunannya?

Apakah sebenarnya arti FCP bagi lahan yang membentang luas yang dikendalikan perusahaan baik secara langsung maupun melalui kemitraan pasokan, untuk ekosistem yang terdampak oleh SMG/APP yang telah melakukan penghancuran hutan selama hampir tiga dekade di Sumatera?

Perusahaan belum memberikan banyak jawaban. Selama beberapa pertemuan “sosialisasi” FCP oleh SMG/APP, perusahaan tidak memberikan rincian, tidak juga data GIS tentang status tutupan hutan alam di konsesi pemasoknya ataupun rencana ekspansi perusahaan.

Pada tinjauan dekat, FCP juga kurang memiliki sejumlah komitmen esensial. SMG/APP tidak berkomitmen menghentikan penghancuran kayu keras tropis campuran (MTH). Pabrik-pabrik pulp-nya bisa menerima MTH tanpa batasan, menciptakan celah lemah yang dapat dimanfaatkan pemasok untuk memasok kayu ke pabrik dari deforestasi baru yang melanggar FCP. SMG/APP tidak berkomitmen untuk melindungi hutan yang tersisa dari kekuatan luar atau untuk menghapus dampak negatif jangka panjang dari praktik perusahaan terhadap tanah gambut, hutan dan keanekaragaman hayati. Para pemburu gelap dan para perambah dapat terus memasuki hutan yang tersisa melalui koridor penebangan perusahaan. Saluran drainase akan terus mengeringkan lahan gambut dan mengakibatkan emisi karbon^{4, 5}. Satwa liar akan terus kekurangan habitat utama seperti koridor migrasi dan tempat persembunyian yang aman.

EoF telah melacak SMG/APP selama bertahun-tahun hingga hari ini, pada awalnya FCP perusahaan,

- (1) melaporkan tentang dampak kegiatan operasional para pemasok SMG/APP di Riau, Sumatera terhadap hutan, satwa liar, dan tanah gambut,
- (2) mengidentifikasi isu-isu hukum yang potensial dari kegiatan operasional di masa lalu seperti kepatuhan dengan rencana tata ruang provinsi, pengembangan lahan gambut dalam dan persyaratan minimal tutupan hutan, dan
- (3) mengevaluasi manfaat konservasi FCP untuk hutan Riau, pusat produksi pulp SMG/APP selama hampir tiga dekade.

Analisis juga dipublikasikan pada GIS *on-line* interaktif EoF

3 | EoF (April 2013) Kemana pohon-pohon itu?

(<http://maps.eyesontheforest.or.id>), yang memanfaatkan *platform* Mesin Peta Google Earth yang memungkinkan para pemangku kepentingan mengevaluasi sendiri beberapa aspek kebijakan baru SMG/APP dan memonitor pelaksanaannya.

EoF akan memperbarui *database*-nya secara teratur dan menyediakan informasi konsesi yang ada dan rincian baru dari provinsi-provinsi lainnya.

Metode

Karena kurangnya data yang diberikan perusahaan, maka EoF menggabungkan data publik yang tersedia dengan informasi yang dikumpulkan selama bertahun-tahun dari investigasi lapangan⁶ untuk analisis ini.

EoF mengidentifikasi perusahaan-perusahaan dan masing-masing blok konsesinya dari mana kayu telah dipasokkan kepada pabrik SMG/APP pada masa lalu berdasarkan informasi perusahaan yang dirilis sejak kegiatan operasionalnya dimulai dan dari investigasi-investigasi EoF. Perusahaan dapat memiliki beberapa konsesi dan tiap-tiap konsesi bisa terdiri dari beberapa blok yang berbeda (blok konsesi). Blok konsesi dipetakan pada GIS web EoF (<http://maps.eyesontheforest.or.id>) dan diberi *hyperlink* ke laporan yang terkait.

Untuk setiap konsesi, EoF memperhitungkan:

- Tutupan hutan alam yang hilang dan yang tersisa antara tahun 1985 hingga 2012 berdasarkan interpretasi visual dari citra Landsat⁷ dan data ilmiah⁸ yang ada. EoF menggunakan tutupan hutan yang dipublikasikannya pada tahun 2012 untuk analisis. (<http://maps.eyesontheforest.or.id>) Citra satelit di mana analisis 2012 didasarkan telah diambil berbulan-bulan sebelum tanggal 1 Februari 2013, tanggal pada saat moratorium SMG/APP atas semua penebangan hutan dimulai. Sehingga EoF mungkin menaksir terlalu rendah penggundulan hutan di blok konsesi yang sedang ditebangi sampai dengan tanggal moratorium. Karena itu, EoF melakukan pengecekan satu titik di konsesi PT Suntura Gajapati milik SMG/ APP dengan menggunakan citra satelit yang diambil pada tahun 2013. EoF menduga bahwa penebangan hutan hingga di bawah total 10% tutupan hutan pada setiap blok konsesi yang ada dianggap ilegal karena konsesi HTI diwajibkan oleh undang-undang untuk melindungi minimal 10% tutupan hutan sebagai "kawasan konservasi"⁹.
- Habitat gajah dan harimau yang hilang dan yang tersisa berdasarkan kawasan jelajah penyebaran gajah¹⁰ dan harimau¹¹ Sumatra yang "asli" yang diidentifikasi oleh para ilmuwan dan disusun oleh EoF. Keduanya dianggap "Terancam dengan kritis" menurut IUCN¹², dianggap sebagai Nilai Konservasi Tinggi 1.2"¹³. Para ilmuwan mempublikasikan peta komprehensif pertama kawasan jelajah harimau hanya 12 tahun setelah SMG/APP memulai kegiatan operasionalnya. Sehingga EoF agaknya menilai rendah dampak perusahaan terhadap habitat harimau.
- Hutan gambut yang hilang dan yang tersisa berdasarkan informasi yang dipublikasikan tentang distribusi dan kedalaman gambut^{14, 15}. EoF menduga bahwa hutan alam di lahan gambut sedalam lebih dari 3 meter telah dilindungi dan penebangan hutan mereka sangat kontroversial secara hukum^{16, 17}. Kami menggunakan data kedalaman gambut yang tersedia untuk Riau, menggunakan dua kategori kedalaman yakni 2-4 meter dan >4 meter sebagai kriteria bagi analisis ini.
- Hutan lindung yang hilang dan yang tersisa berdasarkan rencana tata ruang TGHK aktif Riau (Perjanjian Penggunaan Lahan Hutan, Departemen Kehutanan 1986)¹⁸. EoF menduga bahwa hutan alam di dizonasikan dalam tiga TGHK yaitu "Hutan Suaka Alam & Wisata (HSA-W)", "Hutan Lindung (HL)" dan "Hutan Produksi Terbatas (HPT)" dilindungi dari pembabatan habis dan penebangan atas hutan tersebut karena itu ilegal¹⁹.
- Hutan lindung yang hilang dan yang tersisa berdasarkan komitmen konservasi SMG/ APP sebelumnya, termasuk perlindungan atas Hutan Bernilai Konservasi Tinggi yang menjadi komitmen perusahaan pada tahun 2004^{20, 21, 22, 23}, dan perlindungan hutan di Cagar Biosfer UNESCO di Giam Siak Kecil-Bukit Batu²⁴, Cagar Harimau Senepis^{25, 26, 27, 28, 29} dan Cagar Karbon Kampar^{30, 31, 32}. EoF berasumsi bahwa setiap penebangan pada

hutan-hutan tersebut merupakan pelanggaran terhadap komitmen perusahaan.

EoF kemudian memperkirakan manfaat konservasi FCP untuk hutan dalam blok konsesi para pemasok SMG/APP di Riau: berapa banyak hutan alam yang dapat diselamatkannya yang belum dilindungi oleh hukum dan/atau komitmen konservasi yang telah dilakukan SMG/APP di masa lalu.

Hasil

1. Perusahaan-perusahaan pemasok SMG/APP dan blok-blok konsesinya

EoF mengidentifikasi 47 blok konsesi, dengan total area yang dipetakan seluas 929.204 ha, yang dimiliki oleh 21 perusahaan yang telah memasok kayu ke SMG/APP di Provinsi Riau saja (lampiran 1). Selanjutnya, dalam bagian, terminologi SMG/APP, EoF mengelompokkan perusahaan-perusahaan tersebut ke dalam empat kategori:

- A. Lima perusahaan, yang di depan umum dinyatakan oleh SMG/APP sebagai pemasok "miliknya sendiri"^{33, 34} yang memiliki total area yang dipetakan³⁵ seluas 509.564 ha. Untuk konsesi-konsesi tersebut, APP telah mengeluarkan "moratorium penebangan hutan" pada tanggal 5 Juni 2012 setelah menyelesaikan operasi penebangan hutan alam^{36, 37}. [*PT. Arara Abadi, PT. Riau Abadi Lestari and PT. Satria Perkasa Agung, PT Satria Perkasa Agung Serapung dan PT Satria Perkasa Agung KTH Sinar Merawang.*]
- B. Enam perusahaan, yang di depan umum dinyatakan oleh SMG/APP sebagai pemasok "independen"-nya³⁸, yang memiliki total area yang dipetakan seluas 183.993 ha. Untuk konsesi-konsesi tersebut, APP telah mengeluarkan "moratorium penebangan hutan" pada tanggal 1 Februari 2013. [*PT. Balai Kayang Mandiri, PT. Bina Duta Laksana, PT. Riau Indo Agropalma, PT. Ruas Utama Jaya, PT. Suntara Gajapati dan PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa. Perusahaan terakhir hanya memiliki izin "hak pengusaha hutan (HPH). Dengan atau tanpa moratorium, penebangan hutan skala besar dan pengembangan perkebunan seharusnya tidak terjadi.*]
- C. Enam perusahaan, yang di depan umum dinyatakan oleh SMG/APP sebagai pemasok "independen"-nya³⁹, yang memiliki total area yang dipetakan seluas 175.493 ha. APP menyebut konsesi-konsesi tersebut "HTI penuh", yang menyiratkan bahwa mereka sudah menyelesaikan kegiatan operasional penebangan hutan alam dan hanya beroperasi di areal perkebunan yang telah didirikan. [*PT. Bina Daya Bentala, PT. Bukit Batu Hutani Alam, PT. Mitra Hutani Jaya, PT. Perawang Sukses Perkasa Industri, PT. Rimba Mandau Lestari, dan PT. Sakato Pratama Makmur*]
- D. Empat perusahaan, yang mana kepadanya SMG/APP tidak memberikan informasi asosiasi tetapi yang telah diidentifikasi oleh para investigator Eyes on the Forest sebagai pemasok kayu bagi APP, yang memiliki total area yang dipetakan seluas 60.154 ha. [*Kategori ini meliputi PT. Artelindo Wiratama yang telah menebangi hutan harimau Sumatra di Bukit Tigapuluh selama bertahun-tahun untuk memasok MTH ke APP^{40, 41}, PT. Dexter Timber Perkasa Indonesia yang menyatakan diri sebagai "Grup Sinar Mas"⁴², PT. Putra Riau Perkasa yang dinyatakan APP sebagai "Cagar Karbon Kampar"⁴³ dan PT. Inhil Hutani Pratama yang diidentifikasi sebagai pemasok APP oleh kepolisian daerah Provinsi Riau⁴⁴.]*

Perusahaan-perusahaan tersebut di atas bukanlah satu-satunya pemasok MTH ke pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) milik SMG/APP di Riau pada masa lalu. Pasokan MTH dari "pemasok tak dikenal" tanpa konsesi hutan tanaman industri (HTI) yang cukup signifikan. EoF memperkirakan bahwa PT IKPP di Riau saja telah membuat pulp dari sekitar 1,4 juta ha hutan⁴⁵, lebih dari total area konsesi "para pemasok HTI yang diakui dan diidentifikasi" di Riau tersebut di atas. Termasuk pasokan dari penebangan hutan alam untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, infrastruktur atau kegiatan-kegiatan non-kehutanan. Asal,

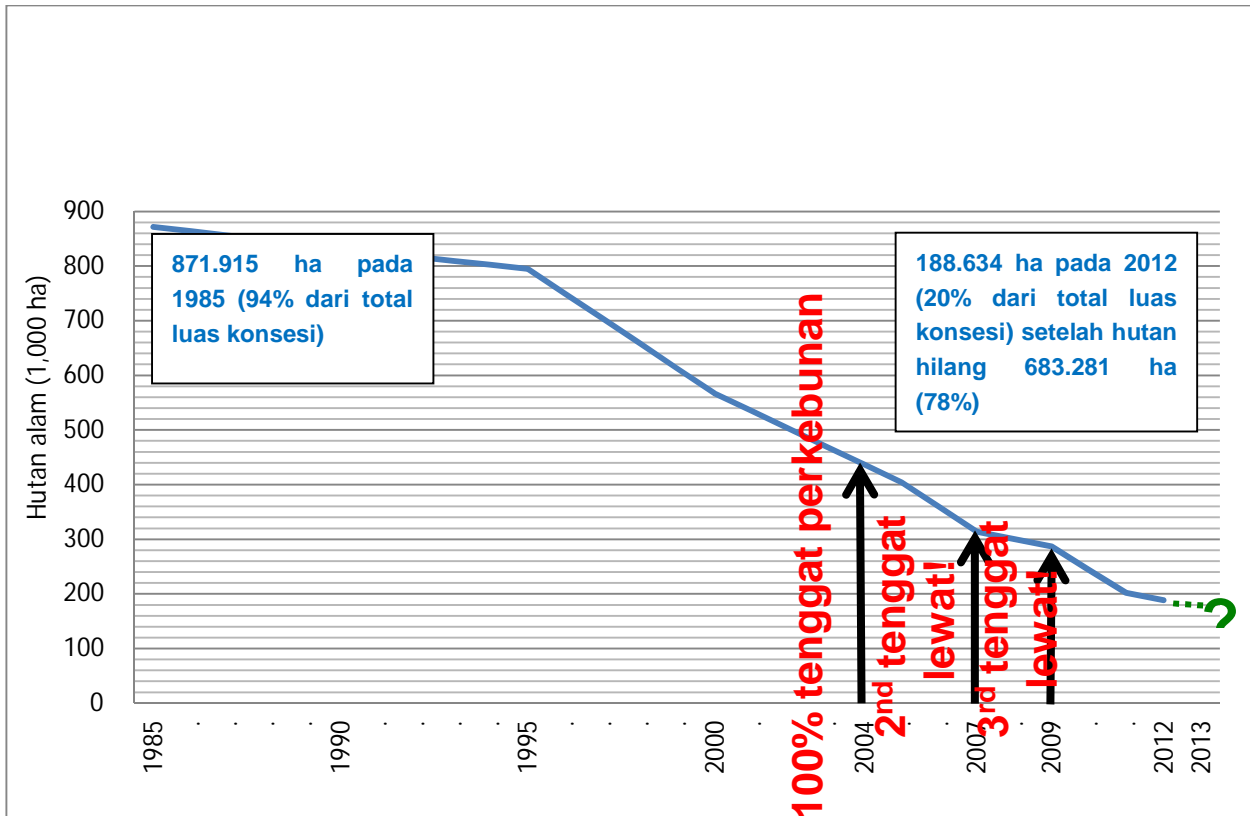
legalitas dan dampak lingkungan hidup dari pasokan tersebut telah jauh lebih sulit untuk diidentifikasi, dilacak dan terutama dikendalikan^{46, 47, 48}.

2. Status Quo: Pembabatan hutan di blok-blok konsesi pemasok SMG/APP

Rincian dari analisis ini tersedia secara *online* di <http://maps.eyesontheforest.or.id> [Lapisan penggundulan hutan konsesi]. Singkatnya, di Provinsi Riau, Sumatera para pemasok SMG/APP telah menghilangkan total 683.281 ha hutan alam dalam konsesi mereka sejak perusahaan tersebut mulai melakukan produksi pulp tahun 1984. EoF menganalisa tujuh kategori, yang seringkali bertumpang tindih, berandil pada berapa banyak total hutan hilang:

- 569.920 ha (83%) hutan yang hilang berada dalam kawasan jelajah habitat harimau dan gajah Sumatra (Peta 1, "Deforestasi konsesi: jelajah satwa liar" di <http://maps.eyesontheforest.or.id>). Data historis pada kawasan jelajah gajah sejak tahun 1985 menunjukkan penurunan jumlah kawasan dan luas kawasan di wilayah Senepis, Libo, Giam Siak Kecil dan Bukit Tigapuluh di mana para pemasok APP telah menebangi hutan alam (Peta 2)⁴⁹. Konflik antara manusia dan harimau yang telah merajalela mengakibatkan hilangnya nyawa di kedua belah pihak, kemungkinan disebabkan oleh hilangnya hutan tempat habitat keduanya⁵⁰.
- 17.254 ha (3%) hutan yang hilang berada dalam blok HCVF dimana tahun 2004 APP telah berjanji untuk melindunginya.
- 1.714 ha (0.3%) hutan hilang di dalam "Suaka Harimau Senepis".
- 170.382 ha (25%) hutan hilang di dalam Cagar Biosfir UNESCO Giam Siak Kecil – Bukit Batu, 3.255 ha di zona inti, 7.081 ha di zona transition dan sisanya di zona penyangga.
- 525.722 ha (77%) hutan yang hilang berada pada tanah gambut (Peta 3, "Deforestasi konsesi: lahan gambut" di <http://maps.eyesontheforest.or.id>). Lahan gambut yang mengalami pembabatan hutan tersebut terus melepaskan gas rumah kaca setiap hari, terutama di bawah pengelolaan perkebunan kayu pulp (HTI).
- 525.722 ha (77%) hutan hilang lewat tiga cara yang dipertanyakan legalitasnya, yang tumpang tindih di beberapa bagian:
 - 301.084 ha (44%) hutan yang hilang berada pada lahan gambut sedalam 2-4 dan >4m meskipun penebangan hutan yang berada di lahan gambut sedalam >3m secara historis sangat kontroversial secara hukum (Peta 3, "Deforestasi konsesi: lahan gambut" di <http://maps.eyesontheforest.or.id>).
- 247.401 ha (36%) hutan yang hilang meskipun secara hukum terlindungi oleh rencana tata ruang TGHK sebagai zona HSA-W, HL dan/atau HPT (Peta 4, "deforestasi konsesi: rencana tata ruang" di <http://maps.eyesontheforest.or.id>).
- 27.496 ha (4%) hutan yang hilang membuat tutupan hutan pada masing-masing blok konsesi berada di bawah batas tutupan hutan 10% yang secara hukum diwajibkan⁵¹.

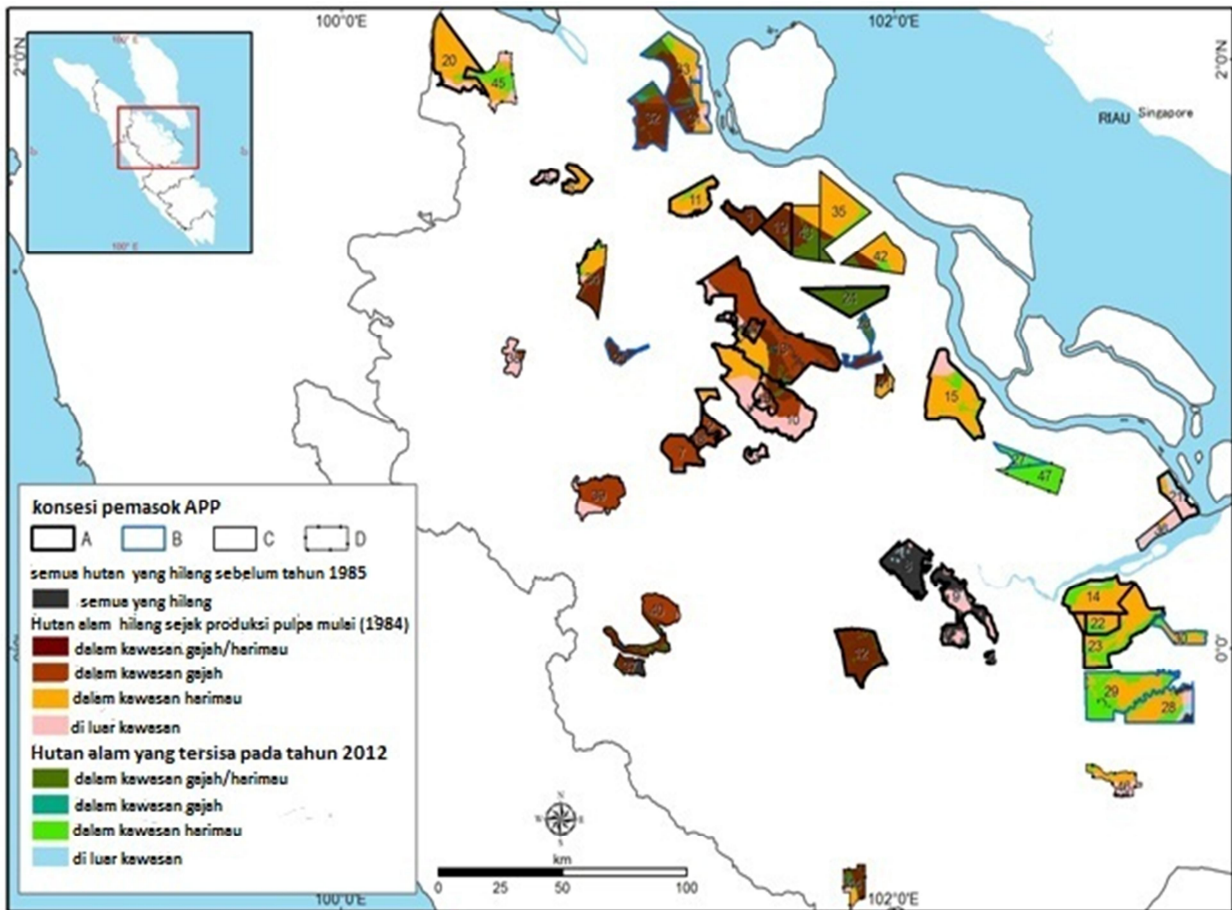
SMG/APP memiliki sejarah panjang pengingkaran janji terkait dengan tenggat tahun untuk mencapai 100% produksi dipasok dari perkebunan: APP terus mengolah pulp dari hutan alam melebihi tenggat waktu tahun 2004⁵², 2007⁵³ dan 2009⁵⁴ (Gambar 1).



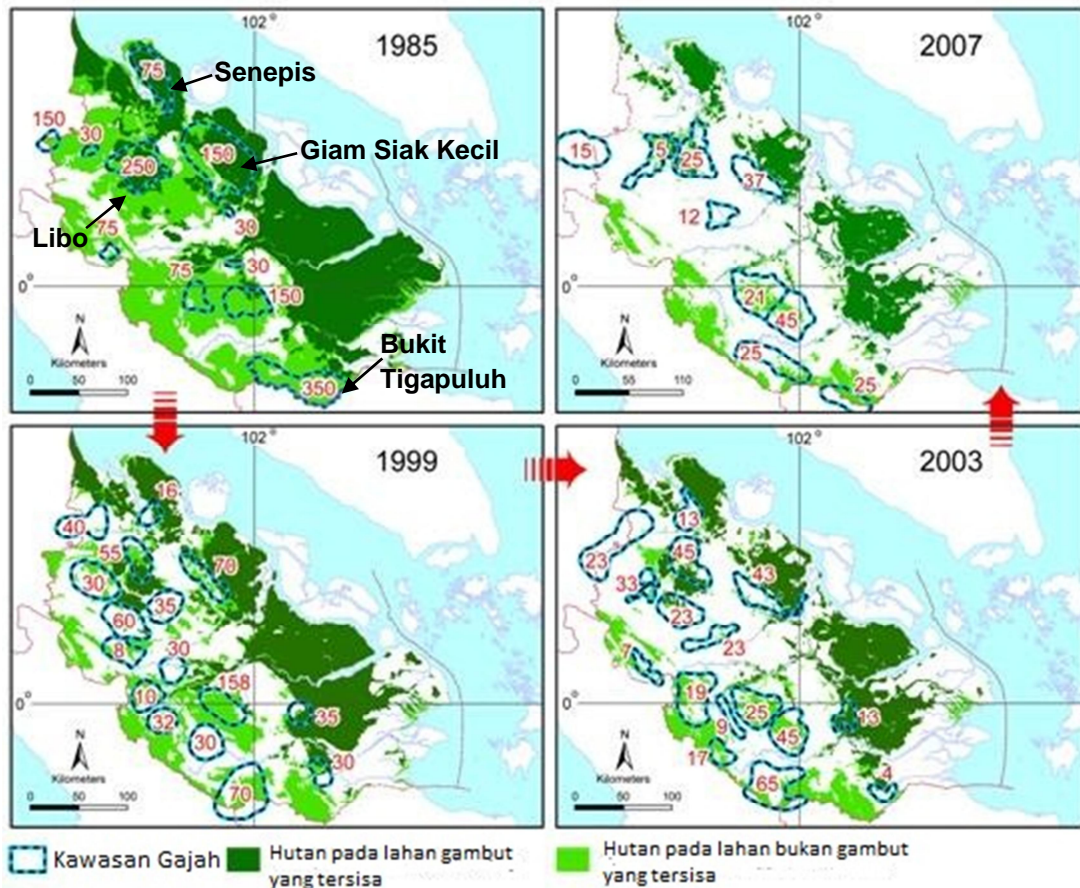
Gambar 1.— Penurunan luas tutupan hutan alam di dalam konsesi para pemasok APP setelah APP mulai memproduksi pulp pada tahun 1984.

Analisis kami menunjukkan bahwa rata-rata kecepatan hutan hilang setiap tahun di konsesi pemasok tidaklah menurun secara signifikan antara 1995-2011. Pengecualian terjadi kala Kepolisian Daerah Riau melakukan pengusutan pembalakan liar oleh industri pulp dan kertas, termasuk para pemasok SMG/APP, akibat adanya quasi-moratorium penebangan hutan di provinsi ini antara 2007-2009^{55, 56}. Setelah tingkat kehilangan hutan cukup tinggi pada 2011, hal ini berkurang lagi pada 2011 dan 2012 menjadi angka sama semasa moratorium. Temuan-temuan yang paling banyak pada hutan tersisa pada 2012 adalah yang dilindungi undang-undang atau oleh komitmen APP sebelumnya (lihat bab selanjutnya). EoF menyimpulkan bahwa pemasok APP di Riau telah kehabisan hutan alam yang tersedia untuk mereka sebelum pengumuman FCP.

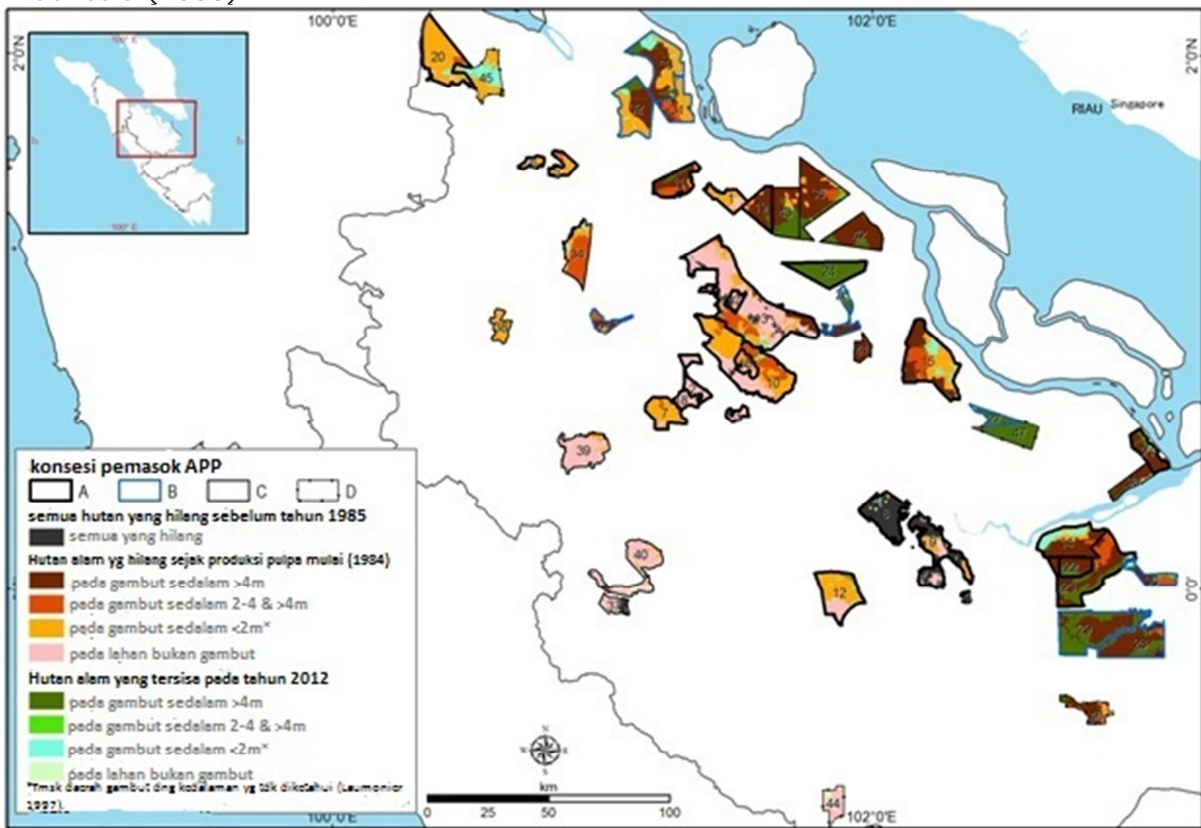
Data resmi dari Kementerian Kehutanan tentang volume pasokan kayu hutan alam hingga 2013 ke pabrik pulp APP dari pemasok grup B di Riau, Jambi dan Sumatera Selatan anjlok di bawah moratorium penebangan APP 1 Februari 2013 yang menemukan semuanya telah kehabisan hutan alam mereka sebelum pengumuman kebijakan.⁵⁷ Laporan Greenomics mengatakan, "Tampaknya komitmen bagi Kebijakan Konservasi Hutan APP yang baru ditunda hingga penebangan hutan alam dan lahan gambut berhutan untuk pembangunan perkebunan kayu pulp telah tuntas."



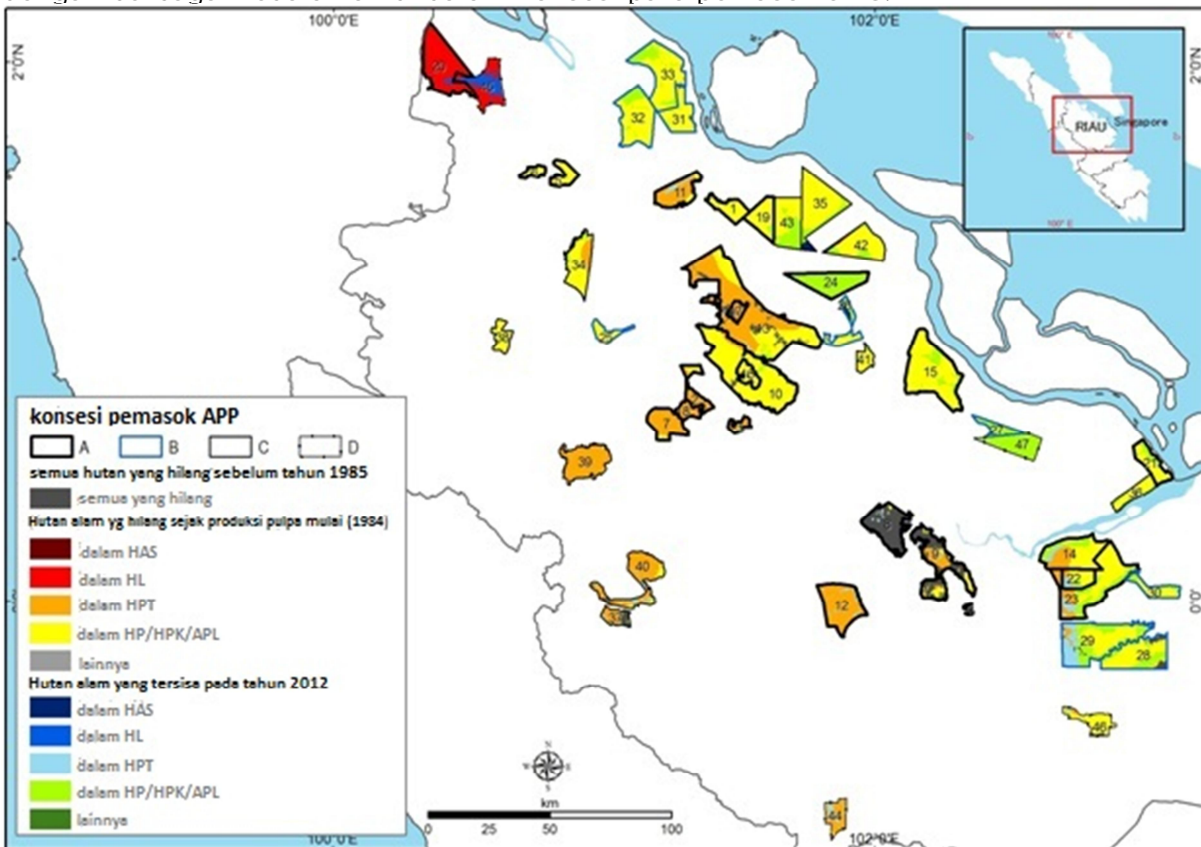
Peta 1.—Hutan yang hilang dan hutan yang masih tersisa dalam kawasan jelajah harimeu dan gajah Sumatera bertumpang tindih dengan konsesi para pemasok SMG/APP.



Peta 2.—Kawasan jelajah Gajah di Riau antara tahun 1985 hingga 2007 dari WWF-Indonesia (2008).



Peta 3.— Hutan yang hilang dan hutan yang masih tersisa di atas lahan gambut dengan berbagai kedalaman di dalam konsesi para pemasok SMG/APP.



Peta 4.— Hutan yang hilang dan hutan yang masih tersisa dalam zona rencana tata ruang TGHK pemerintah yang melindungi hutan alam dari penebangan bertumpuk tindih dengan konsesi

pemasok SMG/APP.

3. Status Quo: Hutan yang tersisa di blok-blok konsesi pemasok SMG/APP

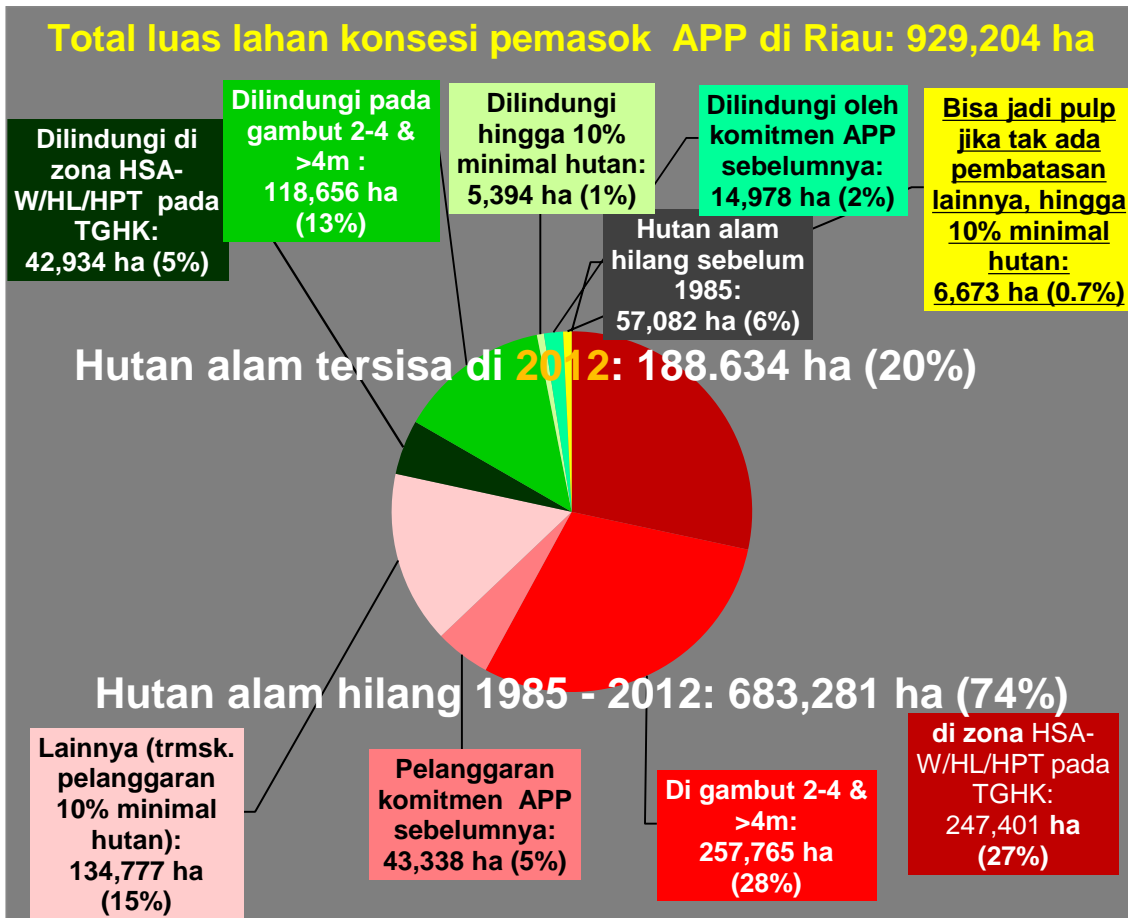
Rincian dari analisis ini tersedia secara *online* di <http://maps.eyesontheforest.or.id> [Lapisan Deforestasi konsesi]. Singkatnya, konsesi para pemasok SMG/APP memiliki total 188.634 hektar hutan alam yang tersisa, dengan tutupan hutan rata-rata 20%. Hanya 6.673 hektar dari 188.634 hektar yang masih dapat ditebangi karena tidak dilindungi baik oleh hukum atau oleh komitmen sebelumnya yang dibuat oleh perusahaan (Gambar 2, Peta 5, Lampiran 1).

Hutan sisanya (23%) tidak boleh ditebangi karena berbagai masalah perlindungan hukum (89%) dan komitmen konservasi perusahaan (8%). Sejumlah kategori perlindungan ini berla

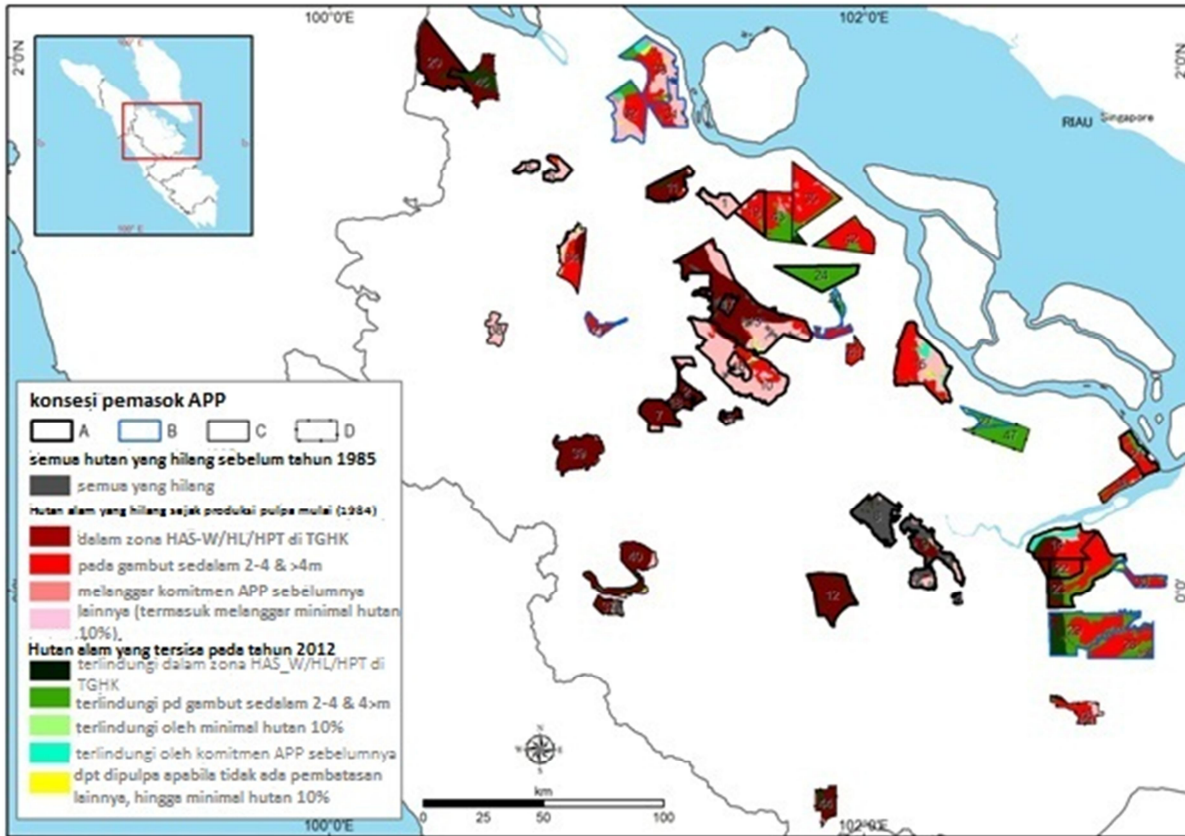
Berapa banyak hutan yang termasuk dalam masing-masing kategori.

- 42.934 ha (23%) seharusnya tidak boleh ditebangi karena termasuk dalam zona untuk perlindungan (HSA-W dan HL) dan untuk tebang pilih (HPT) oleh rencana tata ruang TGHK pemerintah (Peta 4, "Deforestasi konsesi: rencana tata ruang" di <http://maps.eyesontheforest.or.id>).
- 140.721 ha (75%) seharusnya tidak boleh ditebangi karena berada pada lahan gambut sedalam 2-4 dan >4m (batas hukum sedalam >3m) (Peta 3, "Deforestasi konsesi: lahan gambut" di <http://maps.eyesontheforest.or.id>).
- 65.424 ha (35%) hutan tidak boleh ditebangi karena dilindungi oleh batas minimal tutupan hutan 10%.
- 107.308 ha (48%) hutan tidak boleh ditebangi karena telah dilindungi oleh komitmen sebelumnya dari perusahaan.

EoF sejauh ini hanya menganalisis citra satelit yang diambil beberapa bulan sebelum tanggal 1 Februari 2013, tanggal saat SMG/APP mengeluarkan moratoriumnya. Namun, satu titik pengecekan pada citra satelit tahun 2013 mengungkapkan bahwa, pada awal mula moratorium SMG/APP moratorium, PT. Suntara Gajapati pemasok SMG/APP telah menebangi 1.502 hektar hutan tanpa melanggar masalah hukum dan komitmen konservasi perlindungan yang sebelumnya⁵⁸. Kesimpulannya, paling hanya 5.171 hektar hutan yang tersisa di konsesi SMG/APP di Riau yang mendapatkan manfaat dari FCP baru perusahaan. Hutan-hutan tersebut kecil, dengan bagian-bagian yang tersebar di beberapa konsesi, mungkin terlalu kecil untuk dapat memberi kontribusi yang berarti bagi konservasi ekosistem atau bahkan untuk bertahan hidup (Lampiran 1). Mereka juga begitu kecil sehingga sulit untuk ditunjukkan di Peta 5.



Gambar 2.— Persentase hutan yang hilang dan yang tersisa di konsesi para pemasok SMG/APP di Riau, Sumatra. Setiap blok hutan yang hilang dan yang tersisa dapat masuk ke dalam beberapa kategori yang terdaftar tapi di sini hanya tercatat sekali untuk menghindari penghitungan ganda. Misalnya hutan yang ditebangi melanggar komitmen APP berada di lahan gambut dalam dalam zona yang dilindungi oleh rencana tata ruang TGHK hanya didaftar sebagai hutan hilang dalam kategori TGHK.



Peta 5. Hutan yang tersisa di konsesi para pemasok SMG/APP yang secara hukum dilindungi, serta dilindungi oleh komitmen perusahaan sebelumnya, atau tersedia untuk ditebangi.



Foto 1.— Kayu Keras Tropis Campuran yang ditebangi sebelum moratorium tanggal 1 Februari 2013 di konsesi PT. Ruas Utama Jaya dalam kawasan yang dideklarasikan sendiri oleh APP sebagai "Suaka Harimau Senepis", menunggu untuk diangkut ke pabrik pulp APP. Foto diambil oleh Eyes on the Forest pada 1°51'35.48"N, 101°3'14.39"E pada tanggal 14 Januari 2013.

Kesimpulan

Analisis EoF menemukan bahwa :

- Lebih dari 89% dari hutan alam yang tersisa pada 2012 di dalam konsesi para pemasok SMG/APP seluas 929.204 hektar di Riau sudah dilindungi baik oleh hukum maupun oleh tambahan 8% dari komitmen konservasi sebelumnya yang dibuat oleh APP. FCP melindungi tambahan paling banyak seluas 5.171 hektar (2,7%).
- 77% dari hutan alam yang hilang antara 1985 dan 2012 di dalam konsesi para pemasok SMG/APP terjadi lewat cara yang dipertanyakan legalitasnya karena hutan tersebut telah dilindungi oleh rencana tata ruang TGHK, batas kedalaman gambut >3m, dan/atau batas tutupan hutan konsesi minimal 10%.
- 83% dari hutan alam yang hilang antara 1985 dan 2012 di dalam konsesi para pemasok SMG/APP dulunya adalah habitat penting bagi harimau dan gajah Sumatera yang terancam punah secara kritis.
- 77% hutan alam yang hilang antara 1985 dan 2012 di dalam konsesi pemasok SMG/APP terjadi di lahan gambut, yang terus menyebabkan emisi karbon karena dibuka gambutnya untuk mempertahankan dan memanen perkebunan akasia.

Analisis kami menunjukkan bahwa kebijakan diumumkan setelah pemasok APP kehabisan hutan alam yang mereka jadikan pulp, tanpa berkomitmen pada restorasi hutan yang "dilindungi tapi hilang" ini, hutan di habitat spesies terancam punah, tidak juga ada rehabilitasi lahan gambut.

Pada saat sama, SMG/APP menugaskan penyigian Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi yang banyak diiklankan pada konsesi-konsesi setelah mereka menuntaskan penebangan hutan alam terencana, dan nyaris semua hutan tersisa memang sudah seharusnya dilindungi. Tanpa komitmen restorasi, nilai penyigian akan jadi nol besar.

Kajian terbaru oleh Greenomics menyimpulkan bahwa APP berkomitmen pada FCP juga setelah para pemasoknya kehabisan hutan alam untuk dihancurkan jadi pulp di provinsi-provinsi lainnya di Sumatera. Hal yang sama juga benar bagi wilayah yang dikendalikan oleh pemasok SMG/APP di Kalimantan.

Manfaat potensial dari FCP untuk konsesi-konsesi Kalimantan belumlah dievaluasi secara independen. Kurangnya data rinci dari perusahaan soal pemasoknya dan rencana ekspansi, serta hutan alam pada konsesi sekarang dan baru telah menunda analisa semacam itu.

Kurangnya transparansi juga menghalangi pemantauan yang benar-benar independen atas pelaksanaan FCP saat ini. SMG/APP mengumumkan program pengawasan internal terhadap pelaksanaan FCP-nya dan FCP menulis "APP akan menyambut pengamat independen dari pihak ke-3 untuk memverifikasi pelaksanaannya"⁵⁹. Namun, sebegitu jauh program pemantauan dilakukan hanya oleh APP dan konsultannya, The Forest Trust. Tidak ada protokol disepakati untuk "pemantau independen." Guna memberikan organisasi masyarakat sipil akses tanpa syarat kepada LSM dan data yang diperlukan untuk melaksanakan program pemantauan yang benar-benar independen⁶⁰.

Kebijakan juga kekurangan komitmen mendasar lainnya. FCP terus membolehkan MTH untuk diantarkan ke pabrik SMG/APP tanpa batas, menciptakan celah-lemah yang digunakan oleh pemasok untuk "membuka lebar gerbang pabrik" dapat mencoba untuk mengeksploitasi. Karena analisis ini dan banyak laporan investigasi EoF sebelumnya telah menunjukkan, para pemasok SMG/APP telah mengantarkan MTH dalam volume yang sangat besar yang dipertanyakan legalitas penebangannya dan hutan bernilai konservasi tinggi potensial ke pabrik pulp perusahaan selama bertahun-tahun. Mereka ataupun pemasok baru

dapat mencoba untuk memberi MTH dari lokasi pembabatan hutan yang baru sebagai ganti dari hanya pasokan MTH yang diperbolehkan FCP, seperti MTH yang ditebang sebelum tanggal 1 Februari 2013 atau ditebang "dari lahan yang bukan hutan, seperti semak belukar⁶¹", yang bukan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan yang bukan Stok Karbon Tinggi (*High Carbon Stock/HCS*). "Bisnis seperti biasa" mungkin berlaku. Organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Barat baru-baru ini menemukan pembangunan kanal gambut dan kegiatan penebangan di konsesi APP yang dikenai moratorium.⁶²

Fakta bahwa SMG/APP mengumumkan kebijakannya setelah para pemasoknya menuntaskan deforestasi terencana mereka di Sumatera agar terus menerima serat hutan tropis dan belum berkomitmen untuk memperbaiki kerusakan dari penebangan hutan Indonesia dengan sejarah yang panjang yang disebabkan oleh perusahaan merupakan indikasi bahwa perusahaan tidak memiliki minat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam negara tersebut.

Rekomendasi Eyes on the Forest bagi SMG/APP

Mengatasi masalah yang diuraikan dalam laporan ini dapat membuat FCP baru SMG/APP benar-benar menjadi terobosan bagi konservasi hutan dan gambut di Indonesia yang sangat diperlukan. Untuk itu perusahaan perlu:

1. Memulihkan lahan gambut dan hutan hilang terpilih dalam perlindungan (menurut TGHK, gambut sedalam >3m, minimal hutan 10%), daerah dengan Stok Karbon Tinggi dan Nilai Konservasi Tinggi di konsesi-konsesi para pemasok.
2. Berhenti menerima semua serat hutan tropis di semua pabriknya per tanggal 5 Mei 2013, tanggal laporan FCP baru kuartal pertama untuk menutup semua potensi celah lemah dari penyalahgunaan dan memantau pelaksanaan utuh FCP baru secara langsung dan tanpa ragu.
3. Menanggulangi kerusakan infrastruktur seperti jalan dan kanal yang berakibat pada hutan alam dan satwaliar sekitarnya.
4. Memberikan informasi rinci tentang semua konsesi-konsesi para pemasok yang ada dan pernah ada, termasuk informasi tentang batas-batas konsesi, tutupan lahan, kawasan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS) yang diidentifikasi oleh para kontraktor SMG/APP, dan memberikan kepada masyarakat sipil akses ke semua konsesi dan fasilitas yang memungkinkan pemantauan FCP yang benar-benar independen oleh pemangku kepentingan.
5. Memberikan informasi tentang wilayah konsesi baru dan rencana ekspansi pabrik di Indonesia guna membolehkan organisasi masyarakat sipil untuk secara independen mengevaluasi manfaat konservasi FCP di masa yang akan datang.

Rekomendasi Eyes on the Forest kepada para pembeli APP dan mitra usaha lainnya

Jangan membeli produk-produk SMG/APP sampai pemantauan yang benar-benar independen oleh EoF telah mengkonfirmasi bahwa perusahaan

- telah berkomitmen untuk memulihkan hutan dan merehabilitasi lahan gambut terpilih yang telah ditebangi atau dirusak di masa lalu dalam kawasan HCV, HCS dan kawasan lindung dalam konsesinya,
- telah berhenti menerima kayu hutan tropis di semua pabriknya,
- telah menyediakan bagi organisasi masyarakat sipil semua data yang diperlukan untuk pemantauan yang benar-benar independen, telah menunjukkan rekam jejak yang

terbukti dengan keberhasilan pelaksanaan hal-hal di atas dan meningkatkan kebijakan konservasi hutannya untuk jangka waktu tertentu.

SELESAI

Untuk informasi lebih lanjut, sila hubungi:

Editor Eyes on the Forest

Email: editor(at)eyesontheforest.or.id

Lampiran 1. Pemasok SMG/APP di Provinsi Riau, Sumatera

| ID | Grup | Hubungan dengan SMG/APP | Nama perusahaan | Area GIS | Hutan alam yang masih tersisa pada pertengahan tahun 2012 | | Blok hutan alam kecil yang masih tersisa pada tahun 2012 yang mungkin keuntungan dari FCP. | |
|----|------|-------------------------|---|----------|---|------|--|-----------------|
| | | | | (ha) | (ha) | (%) | (ha) | (% total hutan) |
| 1 | A | "Milik Sendiri" | PT. Arara Abadi - Beringin | 9.542 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | A | "Milik Sendiri" | PT. Arara Abadi - Minas | 8.655 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | A | "Milik Sendiri" | PT. Arara Abadi - Minas | 3.552 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | A | "Milik Sendiri" | PT. Arara Abadi - Pelalawan | 848 | 7 | 1% | 0 | 0% |
| 5 | A | "Milik Sendiri" | PT. Arara Abadi - Sedinginan | 7.192 | 47 | 1% | 0 | 0% |
| 6 | A | "Milik Sendiri" | PT. Arara Abadi - Sedinginan | 3.623 | 94 | 3% | 0 | 0% |
| 7 | A | "Milik Sendiri" | PT. Arara Abadi - Minas | 14.779 | 131 | 1% | 0 | 0% |
| 8 | A | "Milik Sendiri" | PT. Arara Abadi - Pelalawan | 23.524 | 688 | 3% | 0 | 0% |
| 9 | A | "Milik Sendiri" | PT. Arara Abadi - Pelalawan | 28.993 | 960 | 3% | 0 | 0% |
| 10 | A | "Milik Sendiri" | PT. Arara Abadi - Duri | 57.818 | 1.659 | 3% | 0 | 0% |
| 11 | A | "Milik Sendiri" | PT. Arara Abadi - Beringin | 15.857 | 1.785 | 11% | 3 | 0% |
| 12 | A | "Milik Sendiri" | PT. Arara Abadi - Nilo | 26.439 | 2.510 | 9% | 0 | 0% |
| 13 | A | "Milik Sendiri" | PT. Arara Abadi - Duri | 88.885 | 3.766 | 4% | 0 | 0% |
| 14 | A | "Milik Sendiri" | PT. Arara Abadi - Pulau Muda | 28.218 | 6.654 | 24% | 230 | 1% |
| 15 | A | "Milik Sendiri" | PT. Arara Abadi - Siak | 44.963 | 7.195 | 16% | 1.519 | 3% |
| 16 | A | "Milik Sendiri" | PT. Riau Abadi Lestari | 6.259 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | A | "Milik Sendiri" | PT. Riau Abadi Lestari | 4.139 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | A | "Milik Sendiri" | PT. Riau Abadi Lestari | 5.434 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | A | "Milik Sendiri" | PT. Satria Perkasa Agung | 13.475 | 730 | 5% | 0 | 0% |
| 20 | A | "Milik Sendiri" | PT. Satria Perkasa Agung - eks. HPHTI PT. Intipalma | 33.841 | 816 | 2% | 0 | 0% |
| 21 | A | "Milik Sendiri" | PT. Satria Perkasa Agung - Serapung | 11.867 | 2.900 | 24% | 21 | 0% |
| 22 | A | "Milik Sendiri" | PT. Satria Perkasa Agung & KTH. Sinar Merawang - Pulau Muda | 9.885 | 3.193 | 32% | 0 | 0% |
| 23 | A | "Milik Sendiri" | PT. Satria Perkasa Agung - Pulau Muda | 40.581 | 14.229 | 35% | 54 | 0% |
| 24 | A | "Milik Sendiri" | PT. Satria Perkasa Agung | 21.197 | 21.197 | 100% | 0 | 0% |
| 25 | B | "Independen" | PT. Balai Kayang Mandiri | 6.031 | 235 | 4% | 0 | 0% |
| 26 | B | "Independen" | PT. Balai Kayang Mandiri | 8.829 | 4.313 | 49% | 0 | 0% |
| 27 | B | "Independen" | PT. Balai Kayang Mandiri | 6.352 | 6.352 | 100% | 311 | 5% |
| 28 | B | "Independen" | PT. Bina Duta Laksana | 29.200 | 8.253 | 28% | 213 | 1% |
| 29 | B | "Independen" | PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa | 44.314 | 25.694 | 58% | 327 | 1% |
| 30 | B | "Independen" | PT. Riau Indo Agropalma | 9.704 | 2.842 | 29% | 1,104 | 11% |
| 31 | B | "Independen" | PT. Ruas Utama Jaya | 16.161 | 743 | 5% | 0 | 0% |

| | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------------------------------|---------|---------|------|--------------------|----|
| 32 | B | "Independen" | PT. Ruas Utama Jaya | 28.612 | 5.835 | 20% | 697 | 2% |
| 33 | B | "Independen" | PT. Suntara Gajapati | 34.790 | 8.970 | 26% | 1,502 ⁱ | 4% |
| 34 | C | "Independen" | PT. Bina Daya Bentala | 20.386 | 1.849 | 9% | 0 | 0% |
| 35 | C | "Independen" | PT. Bukit Batu Hutani Alam | 33.057 | 6.200 | 19% | 0 | 0% |
| 36 | C | "Independen" | PT. Mitra Hutani Jaya | 9.672 | 2.283 | 24% | 396 | 4% |
| 37 | C | "Independen" | PT. Perawang Sukses Perkasa Industri | 6.848 | 531 | 8% | 0 | 0% |
| 38 | C | "Independen" | PT. Perawang Sukses Perkasa Industri | 7.520 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 39 | C | "Independen" | PT. Perawang Sukses Perkasa Industri | 23.084 | 40 | 0% | 0 | 0% |
| 40 | C | "Independen" | PT. Perawang Sukses Perkasa Industri | 24.540 | 2.924 | 12% | 296 | 1% |
| 41 | C | "Independen" | PT. Rimba Mandau Lestari | 5.604 | 261 | 5% | 0 | 0% |
| 42 | C | "Independen" | PT. Sakato Pratama Makmur | 21.895 | 4.414 | 20% | 0 | 0% |
| 43 | C | "Independen" | PT. Sakato Pratama Makmur | 22.888 | 10.071 | 44% | 0 | 0% |
| 44 | D | "Independen" | PT. Artelindo Wiratama | 10.232 | 2.076 | 20% | 0 | 0% |
| 45 | D | "Independen" | PT. Dexter Timber Perkasa Indonesia | 21.767 | 8.738 | 40% | 0 | 0% |
| 46 | D | "Independen" | PT. Inhil Hutani Pratama | 11.561 | 856 | 7% | 0 | 0% |
| 47 | D | "Independen" | PT. Putra Riau Perkasa | 16.594 | 16.594 | 100% | 0 | 0% |
| Total area | | | | 929.204 | 188.635 | 20% | 6.672 | 4% |

ⁱ Blok hutan ini sudah tidak ada lagi. PT Suntara Gajapati menebanginya sebelum tenggat waktu moratorium pada tanggal 1 Februari 2013.

Referensi

- ¹ Asia Pulp & Paper (5 February 2013) Asia Pulp & Paper Group (APP) Commits to an Immediate Halt to All Natural Forest Clearance.
<http://www.rainforestrealities.com/newsroom/press-releases/app-commits-to-an-immediate-halt-to-all-natural-forest-clearance/>
- ² EoF (14 December 2011) The truth behind APP's greenwash.
<http://eyesontheforest.or.id/attach/EoF%20%2814Dec11%29%20The%20truth%20behind%20APPs%20greenwash%20HR.pdf>
- ³ Podium discussion at APP announcement of new forest policy, 5 February 2013, Jakarta.
- ⁴ Miettinen, J., Hooijer, A., Shi, C., Tollenaar, D., Vernimmen, R., Liew, S.C., Malins, C. & S.E. Page (2012) Extent of industrial plantations on Southeast Asian peatlands in 2010 with analysis of historical expansion and future projections. *GCB Bioenergy*, 4: 908–918. doi: 10.1111/j.1757-1707.2012.01172.x
- ⁵ Hooijer, A., S. Page, Jauhiainen, J., W.A. Lee, X.X. Lu, A. Idris & G. Anshari (2012) Subsidence and carbon loss in drained tropical peatlands. *Biogeosciences*, 9, 1053-1071, doi:10.5194/bg-9-1053-2012, 2012.
<http://www.biogeosciences-discuss.net/8/9311/2011/bgd-8-9311-2011.pdf>
- ⁶ <http://www.eyesontheforest.or.id/index.php?page=content&cid=5>
- ⁷ Laumonier, Y., Uryu, Y., Stüwe, M., Budiman, A., Setiabudi, B. & O. Hadian (2010) Eco-floristic sectors and deforestation threats in Sumatra: identifying new conservation area network priorities for ecosystem-based land use planning. *Biodiversity Conservation* 19 (4): 1153-1174. <http://www.springerlink.com/content/c77376k574051178/fulltext.pdf>
- ⁸ Laumonier, Y. (1997) *The Vegetation and Physiography of Sumatra*. Kluwer Academic Publishers.
http://books.google.co.id/books/about/The_vegetation_and_physiography_of_Sumat.html?id=IOcIIZ9hyCYC&redir_esc=y Laumonier, Y., Purnajaya, P. and S. Setiabudi (1987). *International Map of the Vegetation. "Northern Sumatra"*. 1:1.000.000. Institut de la Carte Internationale de la Végétation, Toulouse, France and SEAMEO-BIOTROP, Bogor, Indonesia. http://eussoils.jrc.ec.europa.eu/esdb_archive/eudasm/asia/images/maps/download/ID2014_3TO.jpg Laumonier, Y., Purnajaya and Setiabudi (1986) *International Map of the Vegetation. "Central Sumatra"*. 1:1.000.000. Institut de la Carte Internationale de la Végétation, Toulouse, France and SEAMEO-BIOTROP, Bogor, Indonesia. http://eussoils.jrc.ec.europa.eu/esdb_archive/eudasm/asia/images/maps/download/ID2014_2TO.jpg Laumonier, Y. (1983) *International Map of the Vegetation. "Southern Sumatra"*. 1:1.000.000. Institut de la Carte Internationale de la Végétation, Toulouse, France and SEAMEO-BIOTROP, Bogor, Indonesia. http://eussoils.jrc.ec.europa.eu/esdb_archive/eudasm/asia/images/maps/download/ID2014_1TO.jpg Laumonier, Y. (1990) Search for phytogeographic provinces in Sumatra. In: Baas, P., Kalkman, K. & R. Geesink (Eds) *The plant diversity of Malaysia*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp 193–211. Laumonier *et al.* (2010). *WWF Indonesia (2010) Sumatra's Forests, their Wildlife and the Climate. Windows in Time: 1985, 1990, 2000 and 2009*. http://awsassets.wwf.or.id/downloads/wwf_indonesia_2010_sumatran_forests_wildlife_climate_report_for_dkn_b_appenas.pdf Natural forest cover map since 2009 also generated with the same methodology.
- ⁹ Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 70/Kpts-II/95 Tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri (http://www.dephut.go.id/files/70_95_ind.pdf) bersama dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 246/Kpts-II/1996 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/KPTS-II/1995 Tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri (http://www.dephut.go.id/files/246_96.pdf), bersama dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.21/Menhut-II/2006 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 246/Kpts-II/1996 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/KptsII/1995 Tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri (<http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/1948>)
- ¹⁰ Blouch, R.A. & Haryanto. (1984) *Elephants in Southern Sumatra IUCN/WWF Report No: 3., Project 3033*. Bogor. Mapped in Santiapillai, C. & Jackson, P. 1990. *The Asian Elephant: An Action Plan for its Conservation*. IUCN, Gland, Switzerland. Blouch, R. A. & Simbolon, K. (1985) *Elephants in Northern Sumatra. IUCN/WWF Report No: 9., Project 3033*. Bogor. Mapped in Santiapillai & Ramono (1990)
- ¹¹ Wikramanayake, E.D., Dinerstein, E., Robinson, J.G., Karanth, U., Rabinowitz, A., Olson, D., Mathew, T., Hedao, P., Conner, M., Hemley, G. and D. Bolze (1998) *An Ecology-Based Method for Defining Priorities for Large Mammal Conservation: The Tiger as Case Study*. <https://secure.worldwildlife.org/science/pubs/AnEcologyBasedMethod.pdf>
- ¹² The IUCN Red List of Threatened Species. <http://www.iucnredlist.org/>
- ¹³ The Consortium for Revision of the HCV Toolkit for Indonesia (2009) *Guidelines for the Identification of High Conservation Values in Indonesia (HCV Toolkit – Indonesia)*
http://www.hcvnetwork.org/resources/national-hcv-interpretations/Toolkit%20HCVF%20English%20version_final-26Ja

[n10.pdf](#)

¹⁴ Laumonier, Y. (1997)

¹⁵ Wahyunto, S. Ritung dan H. Subagjo (2003). Peta Luas Sebaran Lahan Gambut dan Kandungan Karbon di Pulau Sumatera / Maps of Area of Peatland Distribution and Carbon Content in Sumatera, 1990 – 2002. Wetlands International - Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC).

<http://www.wetlands.or.id/PDF/buku/Atlas%20Sebaran%20Gambut%20Sumatera.pdf>

¹⁶ Presidential Decree Number 32/1990 on Management of Protected Area, in conjunction with Act of the Republic of Indonesia No. 5 of 1990 Concerning Conservation of Living Resources and Their Ecosystems (<http://faolex.fao.org/docs/pdf/ins3867.pdf>), in conjunction with Law (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Tata Ruang

(http://landspatial.bappenas.go.id/peraturan/the_file/UU_No26_2007.pdf), bersama dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 26 Tahun 2008 tentang Perencanaan Tata Ruang Nasional (http://www.bkprn.org/v2/peraturan/file/PP_26_Tahun_2008.pdf)

¹⁷ Wetlands International (2011) Peatlands in Indonesia's National REDD+ Strategy.

<http://www.wetlands.org/LinkClick.aspx?fileticket=9Nesl6BC11U%3D&tabid=56> See discussion on Presidential Decree 32/1990 in page 26.

¹⁸ Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan (Tata Guna Hutan Kesepakatan/TGHK). Peta TGHK (Forest Land Use Agreement) yang dipublikasikan oleh Kementerian Kehutanan dapat diunduh di:

<http://www.dephut.go.id/halaman/Peta%20Tematik/Tghk/TGRIAU.GIF>

¹⁹ Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. http://www.dephut.go.id/INFORMASI/UNDANG2/uu/41_99.htm Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 Demi Keadilan Berdasarkan Kehutanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.Putusan&id=1015>

²⁰ Rainforest Alliance SmartWood Program (2004) High Conservation Value Forest (HCVF) Assessment Report for: Asia Pulp & Paper/Sinar Mas Group (Pulau Muda District)

<http://eyesontheforest.or.id/attach/SmartWoodHCVFAssReport.PMuda.Final10Oct04.pdf>

²¹ Rainforest Alliance SmartWood Program (2005) High Conservation Value Forest (HCVF) Assessment Report for; Serapung Unit PT Arara Abadi, Asia Pulp & Paper/Sinar Mas Group.

<http://eyesontheforest.or.id/attach/HCVFserapung.pdf>

²² Rainforest Alliance SmartWood Program (2005) High Conservation Value Forest (HCVF) Assessment Report for; Siak District PT Arara Abadi, Asia Pulp & Paper/Sinar Mas Group. <http://eyesontheforest.or.id/attach/HCVFserapung.pdf>

<http://eyesontheforest.or.id/attach/Siak.Full.pdf>

²³ Eyes on the Forest (2012) APP; default on environmental covenant.

<http://eyesontheforest.or.id/attach/EoF%20%28Mar12%29%20APP%20default%20on%20environmental%20covenant%20report%20FINALS.pdf>

²⁴ Asia Pulp & Paper: Industry preserves globally recognized conservation site.

<http://www.rainforestrealities.com/articles/industry-preserves-globally-recognized-conservation-site/> (information as of 9 March 2013)

²⁵ PT. Suntura Gajapati letter, 22 June 2006 and associated documents.

http://www.eyesontheforest.or.id/attach/APPSMG_Sancuarymap_Jun2006_20111216081202.rar

²⁶ EoF (14 December 2011)

²⁷ WWF (14 December 2011) Massive APP greenwash campaign is mostly hogwash, finds new report.

http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/conservation/forests/forests2/asian_pulp_and_paper/?202809/Massive-APP-greenwash-campaign-is-mostly-hogwash-finds-new-report

²⁸ WWF (16 December 2011) Document pulps APP's tiger sanctuary claims.

http://wwf.panda.org/wwf_news/?202873/Documents-pulp-APPs-tiger-sanctuary-claims

²⁹ Greenomics (December 2011) EoF Report: Fact or Fiction?

http://www.greenomics.org/docs/Report_201112_EoF_Report.pdf

³⁰ Asia Pulp & Paper (3 October 2010) Carbon Conservation and APP Introduce the World's First Pulpwood Plantation to Carbon Reserve REDD-Plus Initiative.

<http://www.businesswire.com/news/home/20101003005120/en/Carbon-Conservation-APPIntroduce-Worl>

- ³¹ Greenomics (23 November 2010) Pulling the wool over the public's eyes: APP deceives public over "Kampar Carbon Reserve" project. http://www.greenomics.org/docs/Report_201011_APPdeceivespubliccovercarbonproject.pdf
- ³² EoF (14 December 2011)
- ³³ APP says: "First are APP-owned pulpwood plantation concessions. These are pulpwood supplier companies in which APP has equity stakes. There are six APP-owned pulpwood plantation companies that hold pulpwood plantation concession licenses in Indonesia. These concessions are located in Sumatra and Kalimantan, covering over one million hectares gross in total. Second is APP independent wood suppliers. These are independent companies that hold pulpwood plantation concession licenses in Indonesia. APP has no ownership share in these companies. The companies have long-term contractual agreements to supply APP mills with pulpwood. Currently there are approximately 30 independent companies supplying pulpwood to APP mills." in Asia Pulp & Paper (23 May 2012a) High Conservation Values cover more than 'Natural Forest'. <https://www.rainforestrealities.com/2012/05/23/high-conservation-values-cover-more-than-%E2%80%98natural-forest%E2%80%99/>.
- ³⁴ Sinarmas Forestry website, "History" - http://us.sinarmasforestry.com/about_history.asp?menu=1
- ³⁵ "Mapped area" is the concession area published by the Indonesian Ministry of Forestry's official GIS concession information used for this analysis. It is not necessarily the same as the area specified in concession license documents.
- ³⁶ Greenomics (2012) Why the Indonesian Ministry of Forestry Recommends that Asia Pulp & Paper revise its "APP Sustainability Roadmap 2020 and beyond". http://www.greenomics.org/docs/Report_201210_Greenomics_MOF_Recommendation_to_APP.pdf
- ³⁷ Eyes on the Forest (26 July 2012) SMG/APP: The Pulping Continues. Sustainability roadmap without teeth does not end mills' pulping of Indonesia's rainforests. <http://eyesontheforest.or.id/attach/EoF%20%2826Jul12%29%20SMG%20APP%20The%20Pulping%20Continues%20FINAL.pdf>
- ³⁸ SMG/APP Forest Conservation Policy consultation meeting with NGOs, 13 February 2013 in Jakarta, 22 February 2013 in Pekanbaru, 5 March 2013 in Jambi.
- ³⁹ SMG/APP Forest Conservation Policy consultation meeting with NGOs, 13 February 2013 in Jakarta, 22 February 2013 in Pekanbaru, 5 March 2013 in Jambi.
- ⁴⁰ KKI Warsi *et al.* (2008) APP threatens Bukit Tigapuluh Landscape. <http://eyesontheforest.or.id/attach/KKIWARSI%20FZS%20ZSL%20YPKHS%20WWF%20Indonesia%20%288Jan2008%29%20APP%20Threatens%20Bukit%20Tigapuluh%20Landscape.pdf>
- ⁴¹ KKI Warsi *et al.* (2010) Last chance to save Bukit Tigapuluh. <http://eyesontheforest.or.id/attach/Warsi%20FZS%20EoF%20WWF%20%2814Dec2010%29%20Last%20chance%20to%20save%20Bukit%20Tigapuluh.pdf>
- ⁴² Facebook page of PT. Dexter Timber Perkasa Indonesia, Sinar Mas Group. <http://www.hs.facebook.com/pages/PTDEXTER-TIMBER-PERKASA-INDONESIA-Sinar-Mas-Group/115670725145119>
- ⁴³ Asia Pulp & Paper (3 October 2010)
- ⁴⁴ EoF (11 Feb 2009) Police urged to resume logging cases. <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=213>
- ⁴⁵ Eyes on the Forest (14 December 2011)
- ⁴⁶ WWF Indonesia (16 June 2004) Monitoring of Illegal Logging Operations in Riau, Sumatra: Deliveries of Illegally Cut Wood from Proposed Tesso Nilo National Park to APP's Indah Kiat Pulp and Paper Mill in August 2003 and April 2004. http://www.savesumatra.org/app/webroot/upload/report/WWF_%2816Jun04%29_Deliveries_o_illegally_cut_wood_from_proposed_TNNP_to_APP.pdf
- ⁴⁷ WWF Indonesia (8 June 2004) Legality of Timber Consumed by Asia Pulp and Paper's Mills in Indonesia, January - October 2003. http://www.illegal-logging.info/uploads/Legality_of_Timber_WWF_Indonesia.pdf
- ⁴⁸ Barr, C. (2000) Profits on Paper: The Political-Economy of Fiber, Finance, and Debt in Indonesia's Pulp and Paper Industries. http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/FLEG/20171586/Chriss_Bar.pdf
- ⁴⁹ WWF-Indonesia (2008) Deforestation, Forest Degradation, Biodiversity Loss and CO2 Emissions in Riau, Sumatra, Indonesia. One Indonesian Province's Forest and Peat Soil Carbon Loss over a Quarter Century and its Plans for the Future. http://assets.panda.org/downloads/riau_co2_report_wwf_id_27feb08_en_lr.pdf
- ⁵⁰ Eyes on the Forest (10 January 2013) SMG/APP deforestation and deadly human tiger conflict. http://eyesontheforest.or.id/attach/EoF%20%2810Jan13%29%20SMG%20APP%20Deforestation%20and%20deadly%20human%20tiger%20conflict_FINAL.pdf

- ⁵¹ Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 70/Kpts-II/95 Tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri (http://www.dephut.go.id/files/70_95_ind.pdf) bersama dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 246/Kpts-II/1996 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/KPTS-II/1995 Tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri (http://www.dephut.go.id/files/246_96.pdf), bersama dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.21/Menhut-II/2006 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 246/Kpts-II/1996 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/KptsII/1995 Tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri (<http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/1948>).
- ⁵² Barr, C. (2000) Profits on Paper: The Political Economy of Fiber, Finance, and Debt in Indonesia's Pulp and Paper Industries. CIFOR.
http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/FLEG/20171586/Chriss_Bar.pdf
- ⁵³ Asia Pulp & Paper (2004) APP Sustainability Action Plan.
- ⁵⁴ Asia Pulp & Paper (May 2007) APP 2005/06 Environment Report.
[http://www.asiapulppaper.com/portal/APP_Portal.nsf/Web-MenuPage/1B2BBDDDE7FB9B64C4725739B00232E6A/\\$FILE/SR1.PDF](http://www.asiapulppaper.com/portal/APP_Portal.nsf/Web-MenuPage/1B2BBDDDE7FB9B64C4725739B00232E6A/$FILE/SR1.PDF)
- ⁵⁵ The Jakarta Globe (16 May 2011a) Special Report: How a \$115b Illegal Logging Probe Was Felled.
<http://www.thejakartaglobe.com/nvironment/special-report-how-a-115b-illegal-logging-probe-was-felled/441679>
- ⁵⁶ The Jakarta Globe (16 May 2011b) A Timeline of the Riau Investigation.
www.thejakartaglobe.com/nvironment/a-timeline-of-the-riau-investigation/441823
- ⁵⁷ Greenomics (18 March 2013) APP's artful deception. After pulping its remaining forests, APP positions itself as a conservation leader with new policy.
http://www.greenomics.org/docs/APP%27s_artful_deception_with_new_policy_201303.pdf
- ⁵⁸ See also Greenomics (18 March 2013)
- ⁵⁹ Asia Pulp & Paper (5 February 2013).
- ⁶⁰ Pertemuan konsultasi Kebijakan Konservasi Hutan SMG/APP dengan LSM-LSM di Jakarta, Riau dan provinsi-provinsi lain selama bulan Februari dan Maret 2013.
- ⁶¹ Asia Pulp & Paper (5 February 2013).
- ⁶² WWF Indonesia (28 Maret 2013). Relawan Pemantau Hutan Kalimantan Ragukan Komitmen APP pada Konservasi Hutan.
<http://www.wwf.or.id/?27740/Relawan-Pemantau-Hutan-Kalimantan-Ragukan-Komitmen-APP-pada-Konservasi-Hutan>